



WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 427 TAHUN 2014

TENTANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 344 Tahun 2014 tanggal 3 September 2014, tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang, dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa kendaraan dinas operasional yang sudah dibeli dan dilunasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor : 29-36/BAP/Panitia-Lelang/X-2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang, dapat dilakukan pelepasan hak milik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan/Pelelangan Serta Pelepasan Hak Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang;
17. Keputusan Walikota Padang Nomor 344 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menjual/melelang dan melepaskan hak kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diperkenankan untuk balik nama kendaraan atas nama sendiri.

- KETIGA : Biaya balik nama kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibebankan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil selaku pembeli kendaraan/pemenang lelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 OKTOBER 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 422 TAHUN 2014

TENTANG PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG

**PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

No	Unit Kerja	Identitas Kendaraan		Tahun Perolehan	Nomor				Harga Pasar (Samsat) Rp	Cek Fisik (Disub) %	Harga Pasar x Hasil Cek Fisik	Biaya Perbaikan (Rp)	Harga Limit (Rp)	Harga Jual (Rp)	Pemenang
		Nama / Jenis	Merk / Type		Polisi	Rangka	Mesin	BPKE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dinas Kop & UMKM	Kendaraan Roda Empat	Toyota Innova/Minibus	2006	BA 46 A	MHFXW41G-260018531	1TR-6329774	1754029 C	120.000.000	21.00%	25.200.000	0	25.500.000	27.300.000	NOVIA EKA YANTI
2	DTRTBP	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang/Pick-Up	1993	BA 8202 AA	KF50-145190	5K-9176033	1105599 C	28.800.000	13.65%	3.931.200	0	4.000.000	5.600.000	AGUS SYAFRUDDIN
3	DPU	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang/Pick-Up	1984	BA 8684 AI	KF20-046444	4K-6370416	6190140 C	15.400.000	11.05%	1.701.700	0	2.000.000	3.000.000	IDWAR
4	Dinas Perakbunhut	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang/Pick Up	1990	BA 8690 JA	KF50-070715	5K-9003618	9121692 C	23.600.000	13.25%	3.127.000	0	3.500.000	4.700.000	HADRIANUS
5	Dinas Perakbunhut	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang/Minibus	1991	BA 1724 AZ	KF40-094016	5K-9090853	9482647 C	35.000.000	13.05%	4.567.500	0	5.000.000	6.000.000	OCTAVIA DELRI
6	DKK	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi L-300/Minibus	1992	BA 9072 AK	L300GB-214047	4G32C-487339	2428967 C	28.000.000	10.53%	2.948.400	0	3.000.000	4.100.000	ZINI BALDI /
7	Bagian Umum	Kendaraan Roda Empat	Opel Blazer / Jeep	2001	BA 1192 AE	S.76124710	22SEC25004241	0094300 C	95.000.000	13.08%	12.426.000	0	12.500.000	14.100.000	ELVIRA
8	Bagian Humas	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang/Minibus	1992	BA 1292 AR	KF50-121793	5K-9123453	9585915 C	39.000.000	14.98%	5.842.200	0	6.000.000	7.000.000	BUSTAM
									384.800.000		59.744.000	0	61.500.000	71.800.000	

WALIKOTA PADANG,



MATHYELDI